

Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah untuk Mengukur Kinerja Keuangan Badan Pendapatan Daerah di Kota Malang

Larasati Putri Hardani^{1*}, Atik Andhayani², Indrayati³

¹⁻³ Jurusan Akuntansi, Fakultas Akuntansi Manajemen, Politeknik Negeri Malang

Email: larasatiputrihardani@gmail.com^{1*}, atik.andhayani@polinema.ac.id², indrayati@polinema.ac.id³

Korespondensi Penulis : larasatiputrihardani@gmail.com^{1*}

Abstract. *This study aims to analyze the impact of the implementation of the Government Internal Control System (SPIP) on financial performance at the Regional Revenue Agency (Bapenda) of Malang City from 2022 to 2024. SPIP consists of five key components: control environment, risk assessment, control activities, information and communication, and monitoring. Financial performance is measured using indicators from the Government Institution Performance Accountability System (SAKIP), which reflects how well the government institution achieves its financial goals and objectives. This study uses a quantitative approach with an explanatory method, where data was collected through a questionnaire distributed to 34 Bapenda employees in Malang City. The collected data was then analyzed using SPSS version 25 to examine the relationship between SPIP implementation and financial performance. The results indicate that four of the five SPIP components, namely risk assessment, control activities, information and communication, and monitoring, have a positive and significant impact on financial performance. This means that the better the implementation of these components, the better the financial performance achieved by Bapenda Malang City. However, the control environment component does not significantly affect financial performance. This suggests that while the control environment is important, other factors such as operational control and communication play a more dominant role in supporting financial performance. Based on these findings, several recommendations for Bapenda Malang City include strengthening SPIP implementation by conducting regular coaching and outreach programs. Additionally, it is recommended to hold workshops with all work units, provide technical training to develop dashboards, and establish clear Standard Operating Procedures (SOPs) and flowcharts. Setting up a schedule for SOP publication and routine briefings, as well as developing performance indicators and quarterly evaluation checklists, is expected to enhance SPIP implementation and strengthen financial accountability at Bapenda Malang City.*

Keywords: *Control Environment, Financial Performance, Risk Assessment, SAKIP, SPIP.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terhadap kinerja keuangan pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang tahun 2022-2024. SPIP terdiri dari lima komponen utama, yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Kinerja keuangan diukur menggunakan indikator yang ada dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang menggambarkan seberapa baik instansi pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran keuangan yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode eksplanatori, di mana data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada 34 pegawai Bapenda Kota Malang. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan perangkat lunak SPSS versi 25 untuk mengetahui hubungan antara implementasi SPIP dengan kinerja keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa empat dari lima komponen SPIP memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan, yaitu: penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Artinya, semakin baik implementasi dari komponen-komponen tersebut, semakin baik pula kinerja keuangan yang dicapai oleh Bapenda Kota Malang. Namun, komponen lingkungan pengendalian tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun lingkungan pengendalian penting, faktor-faktor lain seperti pengendalian operasional dan komunikasi lebih mendominasi dalam mendukung kinerja keuangan. Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa saran untuk Bapenda Kota Malang adalah memperkuat implementasi SPIP dengan melaksanakan coaching dan penyuluhan SPIP secara berkala. Selain itu, diusulkan untuk mengadakan workshop bersama seluruh unit kerja dan melakukan pelatihan teknis untuk mengembangkan dashboard serta penyusunan SOP dan flowchart yang lebih jelas. Penetapan jadwal publikasi dan briefing rutin terkait SOP serta penyusunan indikator kinerja dan checklist evaluasi triwulanan diharapkan dapat meningkatkan penerapan SPIP dan memperkuat akuntabilitas kinerja keuangan di Bapenda Kota Malang.

Kata kunci: Lingkungan Pengendalian, Kinerja Keuangan, Penilaian Risiko, SAKIP, SPIP.

1. PENDAHULUAN

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan prasyarat penting dalam mewujudkan aspirasi masyarakat untuk mencapai tujuan dan cita cita bangsa dan negara. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang terukur dan kredibel (Al, 2021). Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja sektor publik melalui berbagai regulasi, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Implementasi SPIP yang efektif menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik karena mampu mengintegrasikan aktivitas pengendalian ke dalam keseluruhan proses organisasi (Al, 2021). SPIP merupakan proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Perkembangan regulasi terkait SPIP dan SAKIP di Indonesia menunjukkan adanya perhatian serius pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan. SPIP yang diatur dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 menjadi landasan bagi setiap instansi pemerintah untuk membangun sistem pengendalian internal yang komprehensif. SAKIP yang diatur dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 menjadi instrumen pertanggungjawaban yang mencakup perencanaan strategis, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja (Palenga, 2017).

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP semakin memperkuat landasan pelaksanaan SAKIP di instansi pemerintah. Implementasi SPIP dan SAKIP memiliki keterkaitan yang erat, dimana SPIP menjadi alat pengendalian untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi, sedangkan SAKIP menjadi instrumen akuntabilitas yang menunjukkan kinerja organisasi (Ma et al., 2025). Penerapan SPIP dan SAKIP pada level pemerintah daerah menunjukkan variasi yang signifikan. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa faktor kepemimpinan, komitmen organisasi dan kompetensi SDM menjadi faktor krusial dalam keberhasilan implementasi kedua sistem tersebut (Setya, 2019). Komitmen pimpinan daerah dalam mendukung implementasi SPIP dan SAKIP menjadi pendorong utama dalam menciptakan budaya organisasi yang berorientasi pada kinerja dan akuntabilitas.

Pemerintah daerah menghadapi berbagai tantangan dalam mengimplementasikan SPIP dan SAKIP, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, resistensi terhadap perubahan, hingga koordinasi antar unit kerja yang belum optimal (Maydiyanti et al., 2020). Meskipun demikian, berbagai upaya terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas implementasi SPIP dan SAKIP, termasuk melalui pendampingan, bimbingan teknis, dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Kementerian PANRB. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memiliki peran strategis dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).

Bapenda memiliki risiko *inherent* yang tinggi terkait dengan potensi kecurangan, kebocoran pendapatan, dan inefisiensi dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah (Desyadi et al., 2023). Implementasi SPIP pada Bapenda menjadi sangat krusial untuk memastikan tercapainya tujuan organisasi, terutama dalam hal optimalisasi pendapatan daerah dan pelayanan prima kepada wajib pajak. SAKIP pada Bapenda berfungsi sebagai instrument pertanggungjawaban yang menunjukkan kinerja Bapenda dalam mencapai target pendapatan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan (Ummah, 2019).

Kota Malang sebagai salah satu kota besar di Jawa Timur sekaligus dikenal sebagai kota pendidikan memiliki potensi ekonomi yang cukup tinggi. Hal ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang stabil dan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun sempat mengalami tekanan akibat pandemi COVID-19 pada tahun 2020–2021, Kota Malang mampu menunjukkan ketahanan ekonomi yang cukup baik (Ramadhani et al., 2023). PDRB Kota Malang atas dasar harga berlaku tercatat sebesar Rp93,05 triliun pada tahun 2023, meningkat dari Rp84,80 triliun pada tahun sebelumnya. Sementara itu, PDRB atas dasar harga konstan (tahun dasar 2010) juga mengalami peningkatan menjadi Rp60,11 triliun dari Rp56,67 triliun pada tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi tersebut didorong oleh sektor industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, transportasi dan pergudangan, serta jasa pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Malang memiliki struktur ekonomi yang cukup beragam dan berdaya saing tinggi di wilayah Jawa Timur.

Dari sisi pendapatan daerah, Pemerintah Kota Malang menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 sebesar Rp2,81 triliun, dengan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1 triliun. Namun, realisasi PAD hanya mencapai Rp792 miliar atau sekitar 79% dari target yang ditetapkan.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun potensi ekonomi cukup besar, Pemerintah Kota Malang masih menghadapi tantangan dalam optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah. Sebagian besar pendapatan daerah masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, yang pada tahun 2023 menyumbang sekitar 64% dari total pendapatan daerah.

Sebagai upaya meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah, Pemerintah Kota Malang berkomitmen mengimplementasikan berbagai sistem pengelolaan keuangan, termasuk Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Komitmen ini diwujudkan melalui Peraturan Wali Kota Malang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Kota Malang. Penerapan SPIP ini mengacu pada regulasi nasional maupun daerah, dengan tujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan serta kinerja instansi pemerintah (Adolph, 2016).

Penulis memilih Kota Malang sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu kota besar di Jawa Timur dengan aktivitas ekonomi tinggi, potensi penerimaan daerah yang besar, serta struktur ekonomi yang kompleks sebagai kota pendidikan dan pariwisata. Kondisi ini menuntut tata kelola keuangan yang akuntabel. Salah satu instansi kunci dalam hal ini adalah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang yang memiliki peran strategis dalam mengelola dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga implementasi SPIP di instansi ini penting untuk dikaji dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja keuangan yang transparan dan akuntabel.

Badan Pendapatan Daerah Kota Malang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pendapatan daerah, Bapenda Kota Malang memiliki peran strategis dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan pendapatan asli daerah lainnya untuk mendukung pembangunan di Kota Malang (Mamuaja et al., 2016). Dalam menjalankan fungsinya, Bapenda kota Malang menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan optimalisasi penerimaan pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan modernisasi sistem pemungutan pajak. Tantangan tersebut semakin kompleks dengan adanya perubahan regulasi perpajakan daerah dan tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendapatan daerah (Putri & Munandar, 2021).

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi sistem pengendalian internal pemerintah untuk mengukur kinerja keuangan di Badan Pendapatan Daerah Kota Malang.

2. KAJIAN PUSTAKA

Pengendalian Internal

The Commitee of Sponsoring Organization (Rumamby et al., 2021) dan (Mamuaja et al., 2016) dalam mengartikan pengendalian internal sebagai berikut: Pengendalian internal merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, serta seluruh personel dalam suatu entitas, yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap pencapaian tujuan organisasi, yang mencakup aspek operasional, pelaporan dan kepatuhan. Menurut (Natalia, 2020) dan (Andhayani, 2024) Pengendalian internal adalah sistem yang mencakup struktur organisasi yang melibatkan *stakeholder*. *Stakeholder* merupakan semua orang, komunitas, atau kelompok masyarakat yang memiliki hubungan dan kepentingan dengan organisasi, perusahaan, dan masalah yang dibahas disebut *stakeholder*. Mereka adalah pihak yang berkepentingan atau pemangku kepentingan, dan mereka memiliki kemampuan untuk dipengaruhi atau mempengaruhi oleh bisnis.

Sistem Pengendalian Internal

Berlandaskan pada Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 terkait Sistem Pengendalian Internal yang diselenggarakan secara menyeluruh di seluruh instansi pemerintah, termasuk di Badan Pendapatan Daerah. SPI yang diterapkan di Badan Pendapatan Daerah bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Penting bagi setiap Badan Pendapatan Daerah di seluruh Indonesia untuk memastikan bahwa implementasi SPI dilakukan secara konsisten sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan BPKP (Silmi, 2024).

Suatu organisasi membawa implikasi perlu sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih transparan serta akuntabel. Kondisi tersebut bisa digapai bilamana semua tingkat pimpinan mengadakan aktifitas pengendalian diseluruh instansi (Pane, 2018). Pemerintah menyelenggarakan kegiatan dalam instansi untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga pertanggung jawaban semua hal itu harus dilakukan dengan efektif dan efisien terkendali serta tertib. (Ikriyati & Aprila, 2019). Pemerintah memerlukan sistem yang bisa memberikan keyakinan untuk penyelenggaraan aktifitas di instansi pemerintah guna menggapai target yang efektif dan efisien. Sistem tersebut dikenal sebagai sistem pengendalian internal yang pada pengaplikasian harus memperhatikan kepatuhan serta keadilan, juga mempertimbangkan kompleksitas, ukuran serta sifat daripada fungsi serta tugas instansi (Mamuaja et al., 2016).

Kinerja

Dalam pandangan Sarsiti (2020), kinerja (*Performance*) yakni ilustrasi tingkatan penggapaian dilaksanakan suatu aktifitas/kebijakan/program dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, serta sasaran organisasi yang berupa *strategic planning*. Sebutan kinerja seringkali dipakai guna menyatakan tingkatan keberhasilan ataupun prestasi seseorang ataupun kelompok (Silaen et al., 2021). Kinerja bisa terlihat apabila seseorang ataupun kelompok tersebut memiliki kriteria kesuksesan yang sudah dipastikan. Kriteria keberhasilan juga meliputi berbagai target maupun tujuan yang akan dicapai (Rivaldo, 2022).

Kinerja Keuangan

Kinerja juga disebut *performance*, didefinisikan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh suatu entitas selama periode tertentu sebagai bagian dari pengukuran keberhasilan pekerjaan. Sistem keuangan digunakan untuk mengukur kinerja. Atau non-keuangan dari tindakan yang dilakukan atau hasil dari aktivitas, proses, atau unit organisasi. Sebaliknya, kinerja organisasi pemerintah daerah, yang mencakup penerimaan dan pengeluaran daerah melalui sistem keuangan yang ditetapkan oleh kebijakan atau peraturan perundang-undangan selama periode anggaran (Susanto, 2019).

3. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang terlibat dalam pengelolaan keuangan dan implementasi SPIP. Berdasarkan data kepegawaian Bapenda Kota Malang tahun 2024, jumlah pegawai yang terlibat dalam pengelolaan keuangan dan implementasi SPIP adalah sebanyak 34 orang yang tersebar di berbagai bidang dan subbidang. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel pada penelitian ini adalah *purposive sampling*. Adapun kriteria responden yang diambil sebagai sampel adalah berikut:

1. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD
2. Bagian Analis Keuangan Pusat dan Daerah Muda
3. Kepala Sub Bidang pengawasan, penagihan dan penindakan
4. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pembukuan

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Sumber data dalam penelitian ini adalah jawaban dari responden melalui kuesioner secara tertulis yang disebar melalui whatsapp dengan google form. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti yaitu kuesioner, dokumentasi, dan observasi.

Teknik analisis data yang digunakan yaitu uji validitas, uji reliabilitas, analisis statistik deskriptif, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji hipotesis, analisis regresi linear berganda, uji t, uji f, dan uji koefisien Determinasi (R^2).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

a Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah distribusi variabel bebas, variabel terikat, atau keduanya normal atau tidak normal (Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS, 2016). Dalam penelitian ini pengujian normalitas data menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov (*Kolmogorov-Smirnov Test*) dengan melihat signifikansi dari residual yang dihasilkan dan pendekatan grafik *normal probability plot*.

b Uji Heteroskedasitas

Dalam model regresi linear ini yang digunakan yaitu metode uji glejser dimana variabel ini sama maka setiap tingkat variabel dinyatakan independen. Berikut hasil uji Heteroskedasitas yang diperoleh:

Tabel 1. Hasil Uji Heteroskedasitas

Coefisient	
model	Sig
1 (Constant)	.055
LP	.087
PR	.070
KP	.224
IF	.069
Pemantauan	.895

Sumber: Data diolah SPSS 25, 2025

Berdasarkan pada tabel 1 dilihat dari pengujian heteroskedastisitas dilakukan menggunakan metode Glejser, di mana nilai absolut residual (ABS_RES) diregresikan terhadap masing-masing variabel independen. Variabel independen yang dianalisis meliputi Lingkungan Pengendalian (LP), Penilaian Risiko (PR), Kegiatan Pengendalian (KP), Informasi dan Komunikasi (IF), serta Pemantauan.

Berdasarkan hasil pengujian, seluruh variabel independen menunjukkan nilai signifikansi yang melebihi angka 0,05. Secara rinci, lingkungan pengendalian (LP) memiliki nilai signifikansi 0,087, Penilaian Risiko (PR) sebesar 0,070, Kegiatan Pengendalian (KP) sebesar 0,224, Informasi dan Komunikasi (IF) sebesar 0,069, dan Pemantauan sebesar 0,895. Karena tidak ada satupun variabel yang memiliki nilai signifikansi di model regresi ini tidak mengalami masalah heteroskedastisitas.

c Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas merupakan salah satu tahapan dalam uji asumsi klasik pada analisis regresi linier berganda, yang bertujuan untuk mendekteksi adanya hubungan linier yang kuat di antara variabel – variabel independen (Ghozali, 2018).. Berikut hasil uji tabel multikolinieritas:

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinieritas

Coefisient	
model	Sig
1 (Constant)	.963
LP	.490
PR	.000
KP	.000
IF	.000
Pemantauan	.048

Sumber: Data diolah SPSS 25, 2025

Berdasarkan tabel 2 hasil analisis regresi parsial (uji t) yang tercantum pada tabel di atas, dapat diketahui bagaimana masing-masing variabel independen memengaruhi variabel dependen, yaitu Kinerja Unit (KU). Variabel-variabel independen yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi Lingkungan Pengendalian (LP), Penilaian Risiko (PR), Kegiatan Pengendalian (KP), Informasi dan Komunikasi (IF), serta Pemantauan.

- a Hasil pengujian menunjukkan bahwa Lingkungan Pengendalian (LP) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,490, yang lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa LP tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap KU.
- b Sementara itu, Penilaian Risiko (PR) memperoleh nilai signifikansi 0,000, yang berada di bawah ambang batas 0,05. Hal ini menandakan bahwa PR berpengaruh signifikan terhadap KU. Koefisien regresi sebesar 1,018 dan nilai beta standar 0,565 mengindikasikan adanya pengaruh positif yang kuat dari PR terhadap KU.

- c Kegiatan Pengendalian (KP) juga terbukti signifikan dalam memengaruhi KU, dengan nilai signifikansi 0,000 dan koefisien beta 0,555. Artinya, semakin optimal pelaksanaan kegiatan pengendalian, maka kinerja unit akan semakin meningkat.
- d Untuk variabel Informasi dan Komunikasi (IF), diperoleh nilai signifikansi 0,002, yang berarti IF berpengaruh signifikan terhadap KU. Namun, arah pengaruhnya negatif, sebagaimana tercermin dari koefisien beta sebesar -0,218. Hal ini menunjukkan bahwa jika penyampaian informasi atau komunikasi tidak berjalan efektif, maka kinerja unit cenderung menurun.
- e Adapun variabel Pemantauan memiliki nilai signifikansi 0,048, yang juga lebih kecil dari 0,05, sehingga berpengaruh signifikan terhadap KU. Koefisien beta sebesar 0,130 menunjukkan pengaruh positif, meskipun kekuatannya tidak sebesar variabel lain.

Secara ringkas, dari kelima variabel independen yang diuji, empat di antaranya-yaitu Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan terbukti berpengaruh signifikan terhadap kinerja unit. Sementara itu, Lingkungan Pengendalian tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan.

d. Uji Hipotesis

a) Uji Regresi Linier Berganda

Pengujian hipotesis pada regresi linier berganda merupakan Langkah krusial dalam analisis statistik untuk menentukan apakah variabel-variabel bebas memiliki dampak signifikan terhadap variabel terikat (Ghozali, 2018, p. 96) dalam proses ini, terdapat dua jenis pengujian utama, yaitu uji t (parsial) dan uji f (simultan). Uji t bertujuan mengevaluasi pengaruh masing-masing variabel independen secara terpisah terhadap variabel dependen, sedangkan uji f digunakan untuk menilai signifikansi pengaruh seluruh variabel independen secara kolektif terhadap variabel dependen. Keputusan dalam pengujian hipotesis ini didasarkan pada nilai signifikansi (*p-value*); apabila *p-value* lebih kecil dari tingkat signifikansi (*alpha*), yang umumnya ditetapkan sebesar 0,05, maka hipotesis nol (H_0) dinyatakan ditolak menandakan adanya pengaruh yang signifikan.

b) Uji F Simultan

Uji F secara simultan merupakan salah satu Teknik dalam analisis regresi linier yang berfungsi untuk menilai apakah seluruh variabel independen secara bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Dalam analisis regresi, tujuan dari uji F ini adalah untuk menentukan model regresi yang digunakan (Ghozali, 2018, p. 98).

Uji F simultan model regresi ini dinyatakan FIT jika nilai SIG. ($<0,05$). Diketahui nilai SIG. sebesar 0,000 ($<0,05$) maka kesimpulan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel dependen.

c) Uji T (Uji Hipotesis)

Uji T atau t-test adalah salah satu metode statistic yang digunakan untuk menguji kebenaran hipotesis tentang rata-rata dari satu kelompok atau untuk membandingkan rata-rata dua kelompok yang berbeda. Uji ini biasanya dilakukan jika data yang diperoleh bersifat interval atau rasio dan berdistribusi normal (Sugiyono, 2017). Berikut tabel hasil uji T uji Hipotesis:

Tabel 3. Hasil Uji T Simultan

Coefisient	
model	Sig
1 (Constant)	.963
LP	.490
PR	.000
KP	.000
IF	.002
Pemantauan	.048

Sumber: Data diolah SPSS 25, 2025

Berdasarkan hasil tabel 3 menyatakan bahwa hasil uji data t simultan sebagai berikut:

1. Nilai SIG. variabel X1 sebesar 0,490 ($<0,05$) maka berkesimpulan variabel X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y
2. Nilai SIG. variabel X2 sebesar 0,000 ($<0,05$) maka berkesimpulan variabel X2 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y
3. Nilai SIG. variabel X3 sebesar 0,000 ($<0,05$) maka berkesimpulan variabel X3 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y
4. Nilai SIG. variabel X4 sebesar 0,002 ($<0,05$) maka berkesimpulan variabel X4 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y
5. Nilai SIG. variabel X5 sebesar 0,048 ($<0,05$) maka berkesimpulan variabel X5 berpengaruh signifikan terhadap Variabel Y.

d) Uji Koefisien Determinasi R²

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh lima variabel independen terhadap satu variabel dependen. Salah satu hasil penting dari analisis ini adalah koefisien determinasi (R^2), yang menunjukkan kontribusi variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2018, p. 97).

Uji koefisien determinasi R^2 diperoleh nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,982. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 98,2% variasi yang terjadi pada variabel dependen (Y) dapat dijelaskan oleh kelima variabel independen (X01, X02, X03, X04, dan X05) secara simultan (Bersama-sama) dalam model regresi linier berganda. Sementara itu, nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,979 mengoreksi *R Square* dengan mempertimbangkan jumlah variabel independen dalam model, sehingga memberikan gambaran yang lebih akurat terhadap kemampuan prediktif (kemampuan model untuk meramalkan) model. Nilai R sebesar 0,991 mengindikasikan adanya hubungan yang sangat kuat antara variabel-variabel independen dengan variabel dependen. Adapun Standar Error of the Estimate sebesar 0,38165 menunjukkan tingkat kesalahan prediksi model yang relatif kecil, yang memperkuat bahwa model regresi ini layak digunakan dalam menjelaskan hubungan antar variabel.

Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda pada penelitian ini, ditemukan bahwa variabel lingkungan pengendalian (X1) tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Bapenda Kota Malang. Temuan ini menjadi sorotan penting, sebab lingkungan pengendalian merupakan elemen fundamental dalam struktur SPIP. Minimnya pengaruh lingkungan pengendalian terhadap kinerja menandakan adanya ketidakharmonisan antara kebijakan yang telah ditetapkan secara formal dengan pelaksanaannya dalam aktivitas organisasi sehari-hari.

Situasi tersebut semakin diperjelas oleh data penurunan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bapenda Kota Malang selama dua tahun berturut-turut. Dari tahun 2022 ke 2023, nilai SAKIP menurun sebesar 0,50 poin, dan kembali turun sebesar 0,22 poin pada tahun berikutnya (2023 ke 2024). Penurunan ini menunjukkan berkurangnya efektivitas pengelolaan kinerja organisasi secara menyeluruh, khususnya dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kinerja berbasis hasil. Berikut adalah tabel data SAKIP tahun 2022-2024:

Tabel 4. Data SAKIP Bapenda

SAKIP BAPENDA	
Tahun	Bobot
2022	85,75
2023	86,25
2024	86,47

Sumber: Diolah, 2025

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan (Sari & Fuadi, 2024), yang menyatakan bahwa meskipun SPIP berkontribusi positif terhadap akuntabilitas kinerja, efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh manajemen perubahan dan komitmen pimpinan. Selain itu, (Ayub et al., 2018) juga mengungkapkan bahwa pengaruh SPIP terhadap SAKIP tidak bersifat absolut, dengan nilai *R-Square* sebesar 0,647, sehingga diperlukan peningkatan kualitas implementasi SPIP. Berikut kesimpulan hasil dari seluruh hasil uji yang sudah diolah peneliti:

Tabel 5. Resume Hasil Penelitian

No	Jenis Uji	Variabel / Indikator	Hasil / Nilai	Kriteria Pengujian	Kesimpulan
1	Uji Validitas	Semua item (X1–X5, Y)	Loading factor > 0,70	Valid jika loading factor > 0,70	Semua item valid
2	Uji Reliabilitas	Semua item	Cronbach's Alpha = 0,983	Reliabel jika $\alpha > 0,70$	Instrumen sangat reliabel
3	Uji Normalitas	Residual data	Asymp. Sig = 0,200 (Kolmogorov-Smirnov)	Normal jika Sig > 0,05	Data terdistribusi normal
4	Uji Multikolinearitas	X1–X5	Tolerance > 0,10; VIF < 10	Tidak terjadi multikolinearitas	Tidak ada multikolinearitas
5	Uji Heteroskedastisitas	X1–X5	Sig Glejser > 0,05	Homoskedastisitas jika Sig > 0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas

6	Uji Autokorelasi	Residual	Durbin-Watson = 1,987	Tidak ada autokorelasi jika $1,5 < DW < 2,5$	Tidak ada autokorelasi
7	Regresi Linear Berganda	X1–X5 terhadap Y	Semua variabel signifikan (Sig < 0,05)	Signifikan jika Sig < 0,05	Semua X berpengaruh signifikan ke Y
8	Uji t (parsial)	X1–X5 terhadap Y	X1–X5: Sig < 0,05	Sig < 0,05 → signifikan	X1–X5 signifikan secara parsial
9	Uji F (simultan)	X1–X5 terhadap Y	F hitung > F tabel, Sig = 0,000	Sig < 0,05 → signifikan	Model signifikan secara simultan
10	Koefisien Determinasi (R^2)	X1–X5 terhadap Y	$R^2 = 0,756$	Semakin besar → model kuat	Model menjelaskan 75,6% variabel Y

Sumber: data diolah peneliti, 2025

Berdasarkan Hasil Tabel 5 maka dapat disimpulkan:

1. Uji Validitas menunjukkan semua pertanyaan dalam kuesioner sudah valid, karena nilai loading factor-nya lebih dari 0,70.
2. Uji Reliabilitas menunjukkan bahwa kuesioner yang digunakan sangat reliabel, dengan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,983.
3. Uji Normalitas menyatakan bahwa data memiliki distribusi normal, karena nilai signifikansi sebesar 0,200 ($> 0,05$).
4. Uji Multikolinearitas menunjukkan tidak ada masalah antar variabel bebas (X1–X5), karena tidak terjadi multikolinearitas ($VIF < 10$ dan $Tolerance > 0,10$).
5. Uji Heteroskedastisitas menunjukkan model sudah homogen, karena nilai signifikansi Glejser $> 0,05$.
6. Uji Autokorelasi tidak menunjukkan adanya korelasi antar residual, karena nilai Durbin-Watson = 1,987 (masuk rentang normal 1,5–2,5).

7. Regresi Linear Berganda menunjukkan semua variabel bebas (komponen SPIP) berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.
8. Uji t menyatakan bahwa masing-masing komponen SPIP (X1–X5) berpengaruh secara parsial terhadap kinerja keuangan.
9. Uji F menunjukkan bahwa kelima variabel SPIP secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap kinerja keuangan, karena nilai Sig = 0,000.
10. Koefisien Determinasi (R^2) sebesar 0,756 artinya 75,6% kinerja keuangan dapat dijelaskan oleh SPIP. Sisanya 24,4% dipengaruhi faktor lain.

Terkait dengan variabel lingkungan pengendalian yang tidak berpengaruh dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa lemahnya pengawasan internal, kurang berkembangnya budaya organisasi yang menjunjung integritas, serta belum optimalnya peran pimpinan dalam membangun etika dan nilai-nilai organisasi menjadi faktor utama yang menyebabkan rendahnya dorongan terhadap kinerja. Kondisi ini secara tidak langsung turut berkontribusi pada penurunan nilai SAKIP yang terjadi.

Rekomendasi dari peneliti yang didukung oleh hasil dari SAKIP pada tahun 2024 agar penurunan nilai SAKIP tidak terus berlanjut berikut beberapa Langkah strategis untuk Bapenda Kota Malang:

a. Penguatan Substansi Lingkungan Pengendalian

Pimpinan Bapenda diharapkan dapat meningkatkan keteladanan serta integritas organisasi melalui pembentukan budaya kerja yang berlandaskan etika, keterbukaan, dan akuntabilitas. Nilai-nilai ini perlu diintegrasikan ke dalam prosedur operasional standar, perilaku kepemimpinan, serta sistem pengawasan sehari-hari

b. Jaminan Ketersediaan Dokumen Pendukung

Penyusunan dan penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk tahun berjalan harus dilakukan secara tepat waktu, sehingga dokumen perencanaan kinerja tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berfungsi strategis dalam menilai kontribusi individu terhadap pencapaian organisasi.

c. Penataan Laporan Reformasi Birokrasi Tematik

Tindak lanjut atas kewajiban pelaporan aksi Reformasi Birokrasi, seperti pelaksanaan relaksasi pajak bagi pelaku usaha yang belum optimal, perlu segera dilakukan agar tidak mempengaruhi penurunan nilai evaluasi, khususnya yang berkaitan dengan hasil pelayanan publik dan adaptasi terhadap perubahan

d. Optimalisasi Tindak Lanjut Evaluasi Internal

Walaupun Bapenda telah memperoleh nilai tinggi dalam evaluasi internal, seluruh rekomendasi yang dihasilkan harus benar-benar dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan nyata, termasuk dalam penyusunan anggaran, strategi pelayanan, serta pengukuran hasil kinerja.

e. Transformasi Budaya Kinerja Pegawai

Seluruh pegawai didorong untuk terlibat aktif melalui pelaksanaan pelatihan rutin, pembinaan (coaching), serta penerapan sistem insentif yang didasarkan pada pencapaian kinerja yang terukur (output dan outcome), sehingga tidak sekadar memenuhi formalitas administrasi.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) yang terdiri dari lima komponen utama, meliputi; lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan terbukti memiliki peran penting dalam mendukung peningkatan kinerja keuangan di Badan Pendapatan Daerah Kota Malang. Hal ini tercermin dari hasil pengujian statistik yang menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara implementasi SPIP dengan kinerja keuangan instansi. Apabila ditelaah lebih lanjut secara parsial, sebagian besar komponen SPIP memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian kinerja. Komponen penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan terbukti mampu mendorong efektivitas pengelolaan keuangan melalui penguatan tata kelola dan pelaksanaan fungsi-fungsi kontrol yang memadai. Keempat komponen tersebut secara signifikan berpengaruh terhadap peningkatan kinerja keuangan, baik dari segi transparansi, efisiensi, maupun akuntabilitas pengelolaan anggaran. Sementara itu, komponen lingkungan pengendalian belum menunjukkan pengaruh yang berarti terhadap kinerja. Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan nilai-nilai dasar seperti integritas pimpinan, etika organisasi, dan budaya kerja belum sepenuhnya dilaksanakan dalam kegiatan sehari-hari, sehingga belum mampu memberikan dampak nyata terhadap capaian kinerja keuangan. Periode penelitian telah mencakup data hingga tahun terakhir. Dengan kecenderungan penurunan capaian akuntabilitas kinerja. Hal ini indikasi bahwa implementasi SPIP, khususnya pada aspek lingkungan pengendalian, masih belum optimal. Penurunan tersebut mencerminkan perlunya penguatan pada aspek budaya organisasi serta komitmen manajerial yang

berkelanjutan. Sangat dibutuhkan strategi yang tidak hanya fokus pada pemenuhan administratif, juga mendorong transformasi nilai dan perilaku kerja yang selaras dengan prinsip tata kelola yang baik.

REFERENSI

- Al, R. A. et. (2021). Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Sistem Pengendalian Internal Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. 5(2), 194-208.
- Ayub, R. D., Suyana Utama, M., & Wardana, I. G. (2018). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan good governance pada Pemerintah Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 4, 987. <https://doi.org/10.24843/eeb.2018.v07.i04.p03>
- Desyadi, D., Jeddawi, M., Ilham, Muh., & Ruhana, F. (2023). Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(1), 277. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i1.1059>
- Ikriyati, T., & Aprila, N. (2019). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, implementasi sistem informasi manajemen daerah, dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma. *Jurnal Akuntansi*, 9(2), 131-140. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.9.2.131-140>
- Ma, N., Halid, N., & Badu, R. S. (2025). Economics and Digital Business Review Pengaruh implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) terhadap penerapan good government governance. 6(2), 1211-1223.
- Mamuaja, B., Ekonomi, F., Bisnis, D., & Akuntansi, J. (2016). Analisis efektivitas penerapan sistem pengendalian intern terhadap kinerja instansi pemerintah di Dinas Pendapatan Kota Manado. *Jurnal EMBA*, 165(1), 165-171.
- Maydiyanti, S., Putri, A. M., & Anriva, D. H. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Pekanbaru. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 10(1), 69-78. <https://doi.org/10.37859/jae.v10i1.1975>
- Natalia, B. (2020). Analisis sistem informasi akuntansi penggajian untuk meningkatkan efektivitas pengendalian internal pada PT. Gamma Utama Sejati. *Business Management, Economic, and Accounting National Seminar*, 1(1), 171-178.
- Palenga, F. H. (2017). Evaluasi penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (studi pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah). *E Journal Katalogis*, 5(1), 172-181.
- Pane, A. A. (2018). Pengaruh penerapan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap perilaku kecurangan. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 4(2), 40. <https://doi.org/10.31289/jab.v4i2.1812>

- Putri, R. S. E., & Munandar, A. (2021). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Malang tahun anggaran 2016-2020. *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi*, 5(3), 2296-2313.
- Rivaldo, Y. (2022). Peningkatan kinerja karyawan. *Eureka Media Aksara*, 1-90.
- Rumamby, W. P., Kalangi, L., & Suwetja, I. G. (2021). Evaluasi implementasi pengendalian internal berbasis COSO pada PT. Moy Veronika. *Jurnal EMBA*, 9(2), 261-268.
- Sari, S. P., & Fuadi, F. (2024). Pengaruh SPIP dan transparansi terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah: Apakah change management dan pergantian kepemilikan mampu memoderasi. 7(2), 383-406. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v7i2.581>
- Sarsiti. (2020). *Buku Akuntansi Sektor Publik - Sarsiti*. In Book.
- Setya, T. (2019). Determinan keberhasilan performance-based budgeting di pemerintah.
- Silaen, N. R., Syamsuriansyah, S., Chairunnisah, R., Sari, M. R., Mahriani, E., Tanjung, R., Triwardhani, D., Haerany, A., Masyuroh, A., & Satriawan, D. G. (2021). Kinerja karyawan.
- Silmi, S. (2024). Analisis maturitas: Sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi peraturan BPKP nomor 5 tahun 2021. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 8(1), 47-58. <https://doi.org/10.30871/jama.v8i1.7304>
- Susanto, H. (2019). Analisis rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Mataram. *Distribusi - Journal of Management and Business*, 7(1), 81-92. <https://doi.org/10.29303/distribusi.v7i1.67>
- Ummah, M. S. (2019). Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Palembang. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1). <https://doi.org/10.35334/jek.v11i1.1246>